

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Dalam agama Islam, masalah keadilan sangat diutamakan termasuk keadilan dalam bidang ekonomi, semua kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi harus mengandung unsur keadilan. Agama Islam menyerukan pengembangan ekonomi yang komprehensif dan memberikan penekanan pada kesejahteraan sosial dan sangat fokus untuk menjaga keadilan sosial, ekuitas, dan pengentasan kemiskinan (G. Rexhepi and N. Ramadani, 2017). Ajaran agama Islam menekankan pada tugas-tugas muslim terhadap kesejahteraan kemanusiaan dan sosial. (Nasution, 2021). Dalam pendistribusian harta, agama Islam sangat menekankan rasa keadilan, dan ini merupakan salah satu bentuk keadilan sosial dalam Islam. Banyaknya instrumen keuangan Islam yang dijadikan sebagai sarana untuk berbagi baik yang hukumnya wajib maupun sukarela menjadi salah satu bukti keadilan sosial tersebut. Setiap individu akan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan akan berusaha juga untuk memperoleh haknya sebagai salah satu realisasi keadilan dalam kehidupannya. (Asnaini, 2014).

Untuk meningkatkan perekonomian nasional dan perekonomian masyarakat, salah satu sektor yang sangat penting adalah sektor keuangan, dan sampai sekarang ini terobosan terobosan – terobosan baru guna meminimalisir kesenjangan dan ketimpangan sosial sedang digiatkan oleh pemerintah sebagai salah satu jakan untuk terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Kemenkop UKM menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu komponen yang menggerakkan roda ekonomi di Indonesia, dan sampai dengan bulan Maret 2021 sudah menyumbang Produk Domestik bruto sebesar enampuluh satu persen atau Rp8.573,89 triliun (Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan nomor 16 tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Pendampingan UMKM Mengakses Pembiayaan Melalui KUR, 2019). Apabila dibandingkan dengan keseluruhan usaha yang ada di Indonesia, jumlah tersebut adalah sembilan puluh sembilan persen yang dicapai oleh UMKM, sehingga sektor UMKM harus

semakin diperhatikan oleh pemerintah karena perannya yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Di samping peran UMKM, peran keuangan mikropun juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, sehingga menarik perhatian dari masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keuangan mikro tersebut. Tak dapat dipungkiri bahwa keuangan mikro menjadi primadona karena dapat memegang dua peran yaitu selain sebagai sebuah lembaga komersil yang harus menjaga efisiensi dan efektivitas operasionalnya tetapi juga dapat berperan sebagai lembaga sosial yang mempunyai keberpihakan kepada masyarakat miskin yang masih gagal paham dengan lembaga perbankan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lahir belakangan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian syariah. Untuk menghindari praktek riba yang sering terjadi di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang banyak dilakukan oleh para rentenir, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah ini dapat menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk mulai pelan-pelan melepaskan diri dan beralih kepada syariah, dan pemerintah pun menaruh harapan yang besar terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Harapan pemerintah bahwa LKMS ini dapat menjadi salah satu alternatif dan menjadi sebuah solusi yang ampuh bagi masyarakat agar dapat terhindar dari praktik riba yang banyak diterapkan oleh para rentenir di sekitar lingkungan tempat tinggal. Cara ini diharapkan dapat menggantikannya dengan prinsip muamalah sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan LKMS memang menjunjung tinggi asas-asas syariah. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah terutama dalam satu dasawarsa terakhir, baik dari jumlah lembaga maupun jumlah nasabah, menunjukkan angka yang luar biasa. Program pengentasan kemiskinan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) sesungguhnya telah dilaksanakan di banyak negara berkembang. Untuk memberikan akses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha untuk masyarakat terutama yang berada di pedesaan, di penghujung tahun 2017, lahirlah Bank Wakaf Mikro yang pertama yang dibidani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinbuk dan LAZNAS. Bank Wakaf Mikro dibuat untuk masyarakat kelas bawah, sehingga pinjaman yang diberikan tanpa agunan. Karena sistem pembiayaan pada bank wakaf mikro ini adalah dengan cara pendampingan pada kelompok nasabah maka OJK menggandeng pesantren sebagai pihak yang mengelola bank wakaf mikro sekaligus

sebagai pendamping kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi wirausaha masyarakat pedesaan. Alasan menjadikan pesantren sebagai pengelola bank wakaf mikro ini antara lain adalah pesantren memiliki komitmen tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat dilingkungan pesantren. Kedua, pemimpin pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan syariah. Ketiga, di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif. Secara umum tujuan dari LKMS ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UMKM terutama yang berada di daerah pedesaan.

Bank Wakaf Mikro yang didirikan oleh OJK, pinbuk dan LAZNAS diharapkan kelahirannya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya kaum perempuan yang merupakan pelaku UMKM di sekitar pesantren dalam waktu relatif singkat tumbuh dan berkembang. Tercatat per Desember 2020 sebanyak 56 Bank Wakaf Mikro telah terbentuk dengan jumlah nasabah sebanyak 38.900 dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 55,6 milyar.

Tabel 1.1 Data Nasional BWM di Indonesia per 31 Desember 2020

Jumlah BWM	Pembiayaan Kumulatif	Pembiayaan Outstanding
56	Rp 55.600.000.000	Rp 10.700.000.000
Jumlah Kumpi	Nasabah Kumulatif	Nasabah Outstanding
4.300 KUMPI	38.900 nasabah	11.700 nasabah

Sumber diperoleh dari Aplikasi Bank Wakaf Mikro , per Desember 2020

Dalam usaha mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin khususnya, tentunya diharapkan LKMS dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan efisien dan efektif agar kegiatan internal dan eksternal dapat berjalan secara berkelanjutan. Efisien berarti ukuran keberhasilan sebuah kegiatan atau proyek yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut pendapat Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat

memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi,2015). Idealnya adalah apabila LKMS menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif , artinya tujuan dari LKMS yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya para pelaku UMKM telah tercapai. Ukuran dari tercapainya tujuan tersebut salah diantaranya adalah berkurangnya jumlah masyarakat miskin terutama yang berada di pedesaan. Salah satu LKMS yaitu Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah efektif dalam mengurangi kemiskinan, yang dilihat dari perkembangan usaha nasabah melalui nilai pembiayaan dan adanya layanan pendampingan usaha oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah (Safitri & Sukmana, 2019)

Penelitian terkait efisiensi pada Lembaga Keuangan Mikro syariah telah banyak dilakukan oleh para akademisi dari Indonesia. Hasil penelitian M. Mahbubi dan Ali Ascarya menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga yang kurang maksimal merupakan sumber utama inefisiensi pada BMT di Sidogiri, kemudian kekuatan modal dan ukuran BMT memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi BMT. Adapun untuk mengukur efisiensi BMT tersebut dengan menggunakan metode *DEA*, beliau menggunakan faktor-faktor input yang meliputi beban bagi hasil, biaya personalia dan beban umum dan administrasi, sedangkan untuk faktor-faktor output dari kegiatan operasionalnya, berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) , jumlah pembiayaan yang disalurkan, pendapatan laba usaha , dan pendapatan operasional lain-lain (Ali, 2010). Hasil penelitian Ahmad Azhari Pohan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia menunjukkan bahwa setiap BUS memiliki kinerja yang efisien. Berbeda dengan BPRS, dari 113 BPRS hanya 19 BPRS yang memiliki kinerja yang efisien. Hal ini mengakibatkan rendahnya rata-rata nilai efisiensi BPRS. Variabel dengan potensi pengembangan terbesar adalah variabel pembiayaan sebesar 68-73%, kemudian variabel aktiva lancar sebesar 58- 62% dan variabel pendapatan operasional lainnya sebesar 61- 65% (Pohan, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmah Damayanti pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Riau Riau memberikan hasil bahwa inefisiensi yang dialami oleh BPRS di Riau disebabkan oleh kelebihan input pada beban personalia serta kurangnya output pada pembiayaan yang diberikan (Damayanti, 2018). Lain halnya dengan Fadhil Ahmad Firdaus, dalam penelitiannya yang berjudul, Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan

Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA), menunjukkan bahwa 12 BPRS wilayah Jabodetabek periode 2015-2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efisiensi yang fluktuatif. Sementara itu, tahap kedua pengujian menggunakan regresi Tobit menunjukkan bahwa hanya variabel faktor internal yaitu CAR yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi BPRS wilayah Jabodetabek. (Naufal & Firdaus, 2018).

Arif Ramadhan et al, mengukur tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*, yaitu dengan pendekatan intermediasi sebagai pendekatan dalam penentuan variabel input dan outputnya. Dengan pendekatan intermediasi digunakan variabel tabungan wadiah, tabungan mudharabah, beban personalia sebagai variabel input dan piutang murabahah dan penempatan bank lain sebagai variabel output. Berdasarkan skor masing – masing menunjukkan bahwa dari 4 BPRS yang diteliti, 3 BPRS yang sudah efisien dan 1 BPRS yang belum efisien. (Ramadhan, Purnomo, Muhtarom, & Chuzaimah, 2017). Pengukuran efisiensi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)” juga dilakukan oleh Inne Handayani, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil analisa model CCR, terlihat bahwa output yang mempunyai kontribusi yang paling besar dalam meningkatkan efisiensi BPRS adalah pendapatan operasional lainnya yaitu sebesar 77,93%, variabel output lainnya yang dapat ditingkatkan adalah aktiva lancar sebesar 46,20%, dan pembiayaan sebesar 41,40%. sebesar 32-41%. (Handayani, 2016).

Penelitian tentang efisiensi Lembaga keuangan mikro juga dilakukan di negara lainnya seperti di India, seorang peneliti yang bernama Surender Singh dan rekan - rekannya melakukan penelitian tentang efisiensi 41 LKM di India menggunakan DEA . Temuan menunjukkan bahwa ada 5 LKM yang efisien, 25 LKM mewujudkan skala ekonomi di bawah efisiensi berorientasi input sedangkan hanya 10 LKM di bawah efisiensi berorientasi output. Implikasi kebijakan penelitian ini menetapkan bahwa perusahaan baru juga dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan fundamental yang kuat, kebijakan rasional dan manajemen. LKM harus lebih berkonsentrasi pelayanan kepada pelanggan

dibandingkan kepada karyawan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. (Singh, Goyal, & Sharma, 2013)

Pengukuran terhadap efisiensi Lembaga keuangan mikro di Tanzania juga ada dilakukan oleh Erasmus Kipesha dalam penelitiannya yang berjudul *Production And Intermediation Efficiency Of Microfinance in Tanzania*. Hasil penelitiannya adalah dari 29 lembaga Keuangan Mikro di Tanzania, LKM pendekatan produksi mempunyai efisiensi teknis rata-rata lebih tinggi di bandingkan dengan LKM dengan pendekatan intermediasi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa LKM di Tanzania harus mengurangi biaya operasi, meningkatkan pendapatan dan alokasi sumber daya mereka dalam rangka meningkatkan efisiensi intermediasi karena tujuan utama LKM tersebut adalah meningkatkan pendapatan orang miskin (Kipesha, 2013b).

Pada tahun 2016 Bereket Zerai Gebremic, at all mengukur tehnikal efisiensi 134 Lembaga keuangan mikro beroperasi di 36 negara Afrika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara teknis ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam kinerja efisiensi di antara berbagai jenis kepemilikan LKM. Lebih penting lagi, LKM dan lembaga keuangan non-bank relatif lebih efisien, sedangkan serikat pekerja / kredit adalah yang paling tidak efisien. (Gebremichael & Gessesse, 2016). Hasil penelitian dari Haq et al. (2010) pada 39 lembaga keuangan mikro penyediaan pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin untuk proyek- proyek wirausaha yang menghasilkan pendapatan di seluruh Afrika, Asia dan Amerika Latin menggunakan analisis data non-parametrik *Data Envelopment Analysis* mengungkapkan bahwa lembaga keuangan mikro non-pemerintah dengan pendekatan produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan lembaga bank keuangan mikro dengan pendekatan intermediasi. (Haq, Skully, & Pathan, 2010).

Efisiensi dan efektivitas adalah dua istilah sentral yang digunakan dalam menilai dan mengukur kinerja organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas juga telah pernah dilakukan oleh Sunil Kumar dan Rachita Gulati, yang mengukur efisiensi pada 27 industri LKM di India dengan faktor input meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Modal serta faktor outputnya Investment , sedangkan untuk mengukur efektivitas, mereka menggunakan faktor input Investment dan faktor outputnya adalah pendapatan bunga bersih. Hasil penelitian mereka dengan menggunakan metode DEA dengan

dua tahap model evaluasi kinerja menghasilkan bahwa efisiensi yang tinggi tidak berarti juga menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam industri LKM di India. (Kumar & Gulati, 2010).

Dari beberapa penelitian terkait efisiensi dan efektivitas pada beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang telah diuraikan di atas, menurut hasil penelitian Ahmad Azhari Pohan, bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan memberikan potensi efisiensi lembaga keuangan sebesar 68-73%. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian M. Mahbubi dan Ali Ascarya yang menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga yang kurang maksimal merupakan sumber utama inefisiensi pada BMT di Sidogiri. Implikasi kebijakan dari penelitian Surender Singh et al menetapkan bahwa perusahaan baru juga dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan fundamental yang kuat, kebijakan rasional dan manajemen. LKM harus lebih berkonsentrasi pelayanan kepada pelanggan dibandingkan kepada karyawan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Beberapa peneliti sebelumnya juga menyimpulkan bahwa beban operasional merupakan salah satu penyebab inefisiensi pada lembaga keuangan mikro.

Kenyataan yang terjadi adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia saat ini masih sangat lemah akan fundamentalnya sendiri, dimana Sumber Daya Insani yang berada di LKMS itu belum bisa menghasilkan kinerja yang memadukan antara keuangan, dakwah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kondisi kesehatan LKMS di Indonesia masih sangat kurang dibandingkan dengan lembaga keuangan besar seperti perbankan, padahal LKMS sangat berperan penting terhadap perkembangan masyarakat miskin yang notabene di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. (Abdul Gani, 2019). Kenyataan tersebut diperburuk lagi dengan musibah yang melanda dunia saat ini, Sejak terjadinya wabah Covid-19 di akhir tahun 2019, lebih dari 200 negara sudah terinfeksi. Virus ini menyebabkan bukan hanya krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. Dampak ekonomi potensial dari wabah covid-19 ini telah memengaruhi efisiensi keuangan dan sosial lembaga keuangan mikro. Penawaran dan permintaan pendanaan pada lembaga keuangan mikro merupakan faktor yang potensial yang mengakibatkan inefisiensi dengan adanya wabah COVID-19 (Zheng & Zhang, 2021) Pandemi covid – 19 ini membuat kemiskinan di seluruh dunia telah

meningkat pada tahun 2020 untuk pertama kalinya lebih dari 20 tahun. Saat ini, sekitar 36% dari populasi hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari. Pandemi Covid-19 diperkirakan akan meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam garis kemiskinan mencapai 150 juta orang lebih. Layanan yang dirancang untuk memerangi kemiskinan, seperti Lembaga Keuangan Mikro harus menghadapi situasi ini dan menemukan cara untuk memperbaikinya secepat mungkin karena pandemi Covid-19, sebagian besar, berdampak negatif terhadap sektor keuangan mikro, meningkatnya kemiskinan karena pendapatan yang semakin berkurang akibat dari berbagai macam pembatasan pemerintah di seluruh dunia. Pinjaman menjadi lebih berisiko dan sering mengalami gagal bayar. Temuan Pakpahan (2020) mengenai dampak Covid-19 terhadap UMKM mendapati bahwa pandemic Covid-19 memberikan pengaruh negative bagi perekonomian domestik di antaranya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. (Abella, 2021) Apakah hanya UMKM yang terdampak dengan adanya pandemic covid-19 ini? Bagaimana dengan lembaga keuangan mikro syariah yang mengucurkan pembiayaan kepada UMKM? Suminto, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan mengatakan, covid-19 menyebabkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengalami *double crisis*, karena menurunnya likuiditas (risiko likuiditas) di mana anggota lebih memilih menarik simpanannya dan menghentikan membayar simpanan karena penghasilannya terdampak. LKMS menghadapi tekanan likuiditas yang besar di tengah-tengah pandemi yang banyak orang *lay off* dan turun pendapatan dan ini berdampak pada DPK di lembaga keuangan,” ujarnya. Selanjutnya, terhambatnya pengembalian pembiayaan (risiko pembiayaan) UMK yang sebagian besarnya adalah pedagang pasar dan kaki lima kehilangan penghasilannya karena berkurangnya jumlah pembeli secara signifikan. Begitu juga dengan sisi pembiayaan di tengah lesunya kegiatan UMKM, permintaan kredit turun signifikan,” lanjut beliau.

Dampak kepada produksi juga terhambat karena sulitnya bahan baku dan distribusi terhambat, sehingga banyak anggota pembiayaan yang terdampak mengalami gagal bayar. (Tohirin & Afandi, 2020), Bank Wakaf Mikro pun terkena imbasnya dimana jumlah pembiayaan bermasalah sempat melonjak, terutama pada BWM yang berada di Jawa Barat yang awalnya nol langsung meningkat. Hal ini

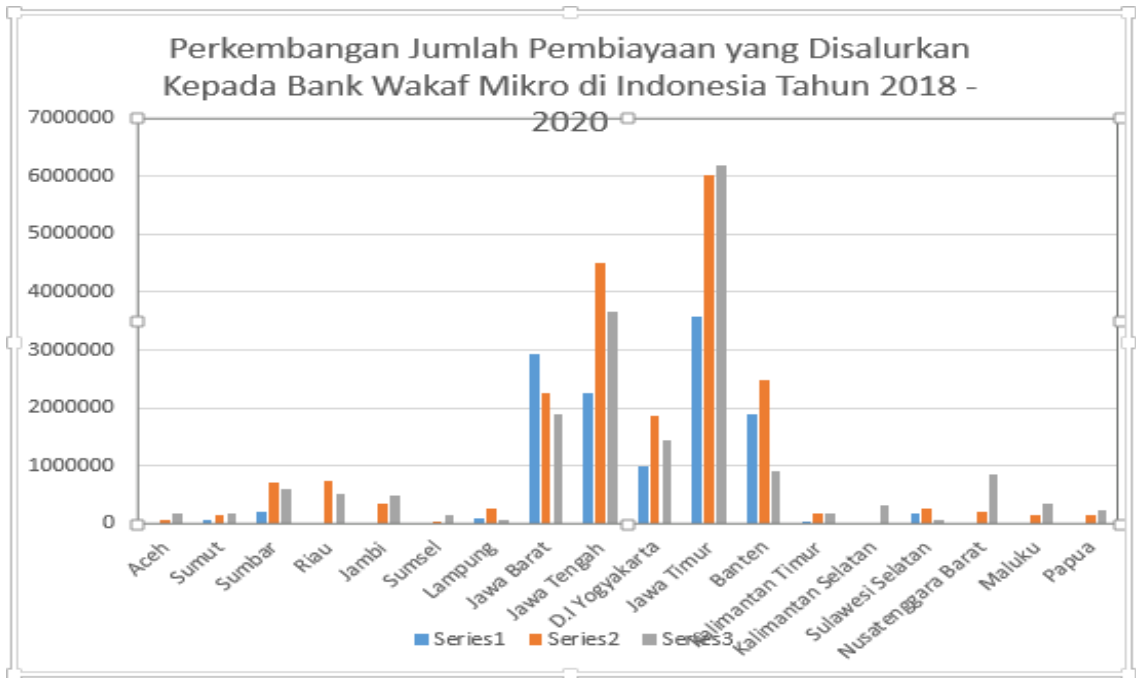
disebabkan nasabah yang berusaha di sekitar pesantren banyak yang tidak berjalan usahanya karena pesantren sempat tutup di awal – awal berlangsungnya covid-19. Begitu juga halnya dengan penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Pasalnya BWM tersebut kebanyakan memiliki nasabah di sekitar pesantren yang aktivitasnya terganggu virus Corona.

Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan disalurkan BWM Tahun 2018-2020

No	Propinsi Lokasi BWM	TAHUN		
		2018 (Rp 000)	2019 (Rp 000)	2020 (Rp 000)
1	Aceh	-	70.000	170.800
2	Sumut	76.880	157.000	173.500
3	Sumbar	201.800	698.200	600.000
4	Riau	-	725.000	524.000
5	Jambi	-	335.000	477.500
6	Sumsel	-	6.000	143.800
7	Lampung	96.200	255.700	65.300
8	Jawa Barat	2.921.800	2.248.919	1.885.400
9	Jawa Tengah	2.255.200	4.497.838	3.661.500
10	D.I Yogyakarta	985.910	1.869.300	1.432.800
11	Jawa Timur	3.578.340	6.027.300	6.194.500
12	Banten	1.901.100	2.494.400	900.000
13	Kalimantan Timur	14.000	169.500	169.500
14	Kalimantan Selatan	-	-	308.000
15	Sulawesi Selatan	169.000	272.000	54.000
16	Nusatenggara Barat	-	205.000	845.000
17	Maluku	-	143.000	338.000
18	Papua	-	143.000	245.300
		12.400.230	20.317.157	18.881.900

Sumber : LKMS- BWM I Statistik Data Nasional

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2018 yang merupakan tahun ke 2 berdirinya Bank Wakaf Mikro, Bank ini sudah tersebar di 10 propinsi dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 12, 4 Milyar. Di tahun 2019 , Bank Wakaf Mikro sudah bertambah di beberapa propinsi yaitu 17 propinsi dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat menjadi Rp 20,3 Milyar. Pada tahun 2020, Bank Wakaf Mikro sudah tersebar di 18 propinsi dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan turun menjadi Rp 18,8 Milyar.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan Kepada Bank Wakaf Mikro di Indonesia Tahun 2018 – 2020

Dari gambar 1.1 di atas terlihat bahwa ada di beberapa propinsi , jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro dari tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 ke tahun 2020 mengalami penurunan , propinsi di luar Jawa antara lain adalah propinsi Sumbar, Riau , Lampung dan Sulawesi Selatan , sedangkan di pulau Jawa, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro mengalami penurunan , kecuali Bank Wakaf Mikro yang berada di propinsi Jawa Timur yang tidak mengalami penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan .



Gambar 1.2. Perkembangan Jumlah Pembiayaan yang disalurkan Pada Bank Wakaf Mikro di Indonesia Tahun 2018 – 2020

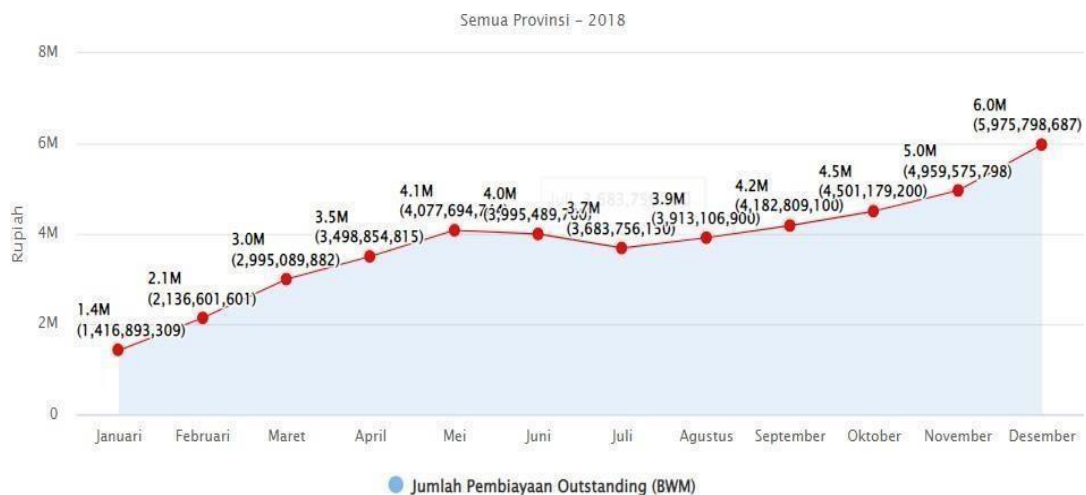
Dari gambar 1.2 di atas , total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro di Indonesia dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan karena semakin bertambahnya jumlah Bank Wakaf Mikro , sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada pertambahan Bank Wakaf Mikro di propinsi Kalimantan Selatan, tetapi jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan karena disebabkan pandemi covid-19 yang melanda dunia , termasuk di Indonesia.

Tabel 1.3. Data Pembiayaan *Outstanding* BWM di Indonesia tahun 2018
(dalam ribuan rupiah)

No	Propinsi Lokasi BWM	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	SUMUT										17.780	60.140	66.180
2	SUMBAR					21.400	21.350	30.600	38.400	82.300	104.725	93.950	132.660
3	LAMPUNG											41.230	89.493
4	JAWA BARAT	509.483	790.000	978.134	1.051.634	1.080.734	1.019.219	958.483	967.585	941.861	954.432	882.462	1.100.337
5	JAWA TENGAH	319.720	4.450.270	634.000	695.259	916.240	995.694	950.477	1.106.880	1.131.180	1.186.880	1.282.814	1.484.079
6	DI YOGYAKARTA	95.420	140.760	165.680	234.560	296.980	269.540	239.480	257.751	261.080	327.069	336.854	552.209
7	JAWA TIMUR	381.049	556.595	929.964	1.112.690	1.173.859	1.130.644	1.033.004	993.014	1.004.537	936.202	1.273.642	1.465.059
8	BANTEN	111.250	198.970	287.304	404.440	584.480	540.280	474.750	522.764	706.435	900.465	882.595	946.894
9	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.450	12.400
10	SULAWESI SELATAN	0	0	0	0	4.000	18.760	16.960	36.710	55.435	72.635	96.435	126.485

Sumber : LKMS- BWM I Statistik Data Nasional

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah pembiayaan *outstanding* pada tahun 2018 di setiap propinsi Bank Wakaf Mikro. Trend perkembangan jumlah pembiayaan *outstanding* dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Pembiayaan Outstanding BWM Tahun 2018

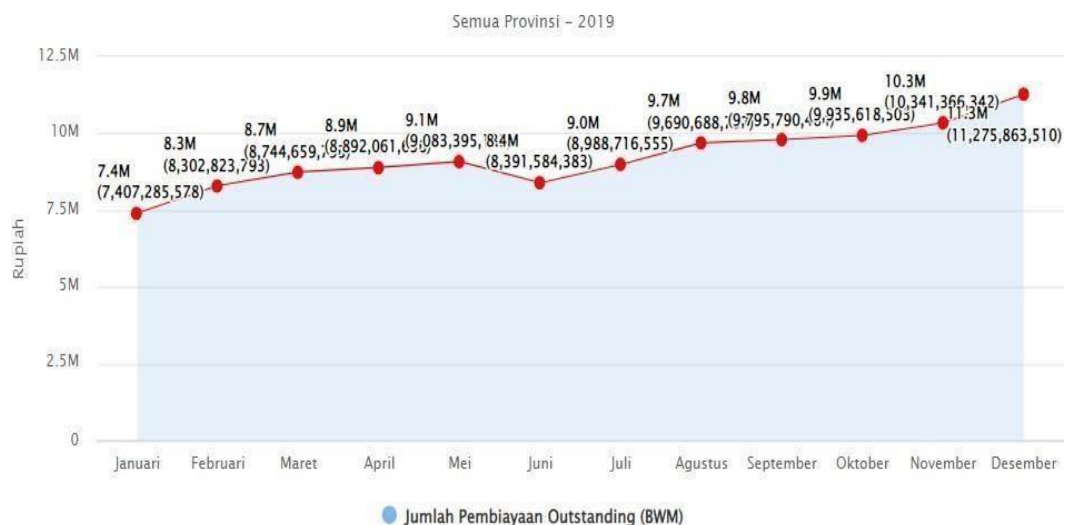
Dari grafik 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah pembiayaan outstanding meningkat rata – rata dari bulan ke bulan, walaupun pada bulan Juli sempat mengalami penurunan. Pada akhir Desember 2018 saldo pembiayaan outstanding berjumlah Rp 6 Milyar yang artinya 52 % dari jumlah pembiayaan yang disalurkan telah tertagih.

Tabel 1.4. Data Pembiayaan Outstanding BWM di Indonesia tahun 2019
(dalam ribuan rupiah)

NO	Propinsi Lokasi BWM	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	ACEH											38.000	70.000
2	SUMUT	94.880	114.880	114.880	114.880	114.880	114.880	134.880	134.880	134.880	211.880	213.880	233.880
3	SUMBAR	244.200	291.200	309.000	361.300	446.808	446.808	535.500	593.500	633.900	736.700	813.100	905.400
4	RIAU				63.000	226.000	273.000	461.000	589.000	645.000	651.000	725.000	725.000
5	SUMSEL												6.000
6	JAMBI	70.000	143.000	190.000	205.000	225.000	225.000	253.000	310.000	322.000	335.000	335.000	335.000
7	LAMPUNG	100.000	100.150	100.150	100.150	115.150	115.150	115.150	135.000	155.000	155.000	261.000	351.849
8	JAWA BARAT	3.290.500	3.942.249	4.350.000	4.603.500	4.816.249	4.848.750	5.006.000	5.193.500	5.358.499	5.599.750	5.711.499	6.409.050
9	JAWA TENGAH	3.629.649	3.832.649	4.182.650	4.450.149	4.459.649	4.750.649	5.268.149	5.784.650	6.255.900	6.731.149	7.265.149	7.762.149
10	DI YOGYAKARTA	1.154.610	1.219.510	1.346.009	1.552.509	1.753.410	1.792.909	1.894.409	2.102.509	2.252.709	2.432.709	2.588.709	2.773.534
11	JAWA TIMUR	4.383.940	5.145.840	5.717.040	6.320.379	7.054.730	7.225.529	7.884.630	8.657.210	9.156.709	9.812.209	10.537.960	11.550.595
12	BANTEN	2.405.700	2.592.600	2.776.399	3.016.900	3.234.899	3.267.399	3.532.420	3.710.919	3.993.420	4.307.420	4.499.919	4.654.920
13	NUSATENGGA BARAT							107.000	183.000	240.000	305.000	327.000	355.000
14	KALIMANTAN SELATAN											10.000	25.000
15	KALIMANTAN TIMUR	23.000	60.000	66.000	86.000	86.000	88.000	91.000	91.000	122.500	133.500	183.500	183.000
16	SULAWESI SELATAN	227.000	252.000	270.000	270.000	315.000	315.000	327.000	340.000	349.000	415.000	435.000	441.000
17	MALUKU						8.000	75.000	116.000	198.000	205.000	205.000	205.000
18	PAPUA			14.000	40.000	48.000	71.000	100.000	108.000	110.000	120.000	143.000	143.000

Sumber : LKMS- BWM I Statistik Data Nasional

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah pembiayaan outstanding Bank Wakaf Mikro di 18 propinsi, dan perkembangan jumlah pembiayaan outstanding pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.4 Perkembangan Jumlah Pembiayaan Outstanding BWM Tahun 2019

Dari tabel 1.4 dan grafik 1.4 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah pembiayaan outstanding meningkat rata – rata dari bulan ke bulan, walaupun padabulan Juni 2019 sempat mengalami penurunan. Pada akhir Desember 2019 saldo pembiayaan outstanding berjumlah Rp 11,3 Milyar. Persentase pembiayaan outstanding dari pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 adalah 46% atau 54 % dari pembiayaan yang disalurkan telah tertagih.

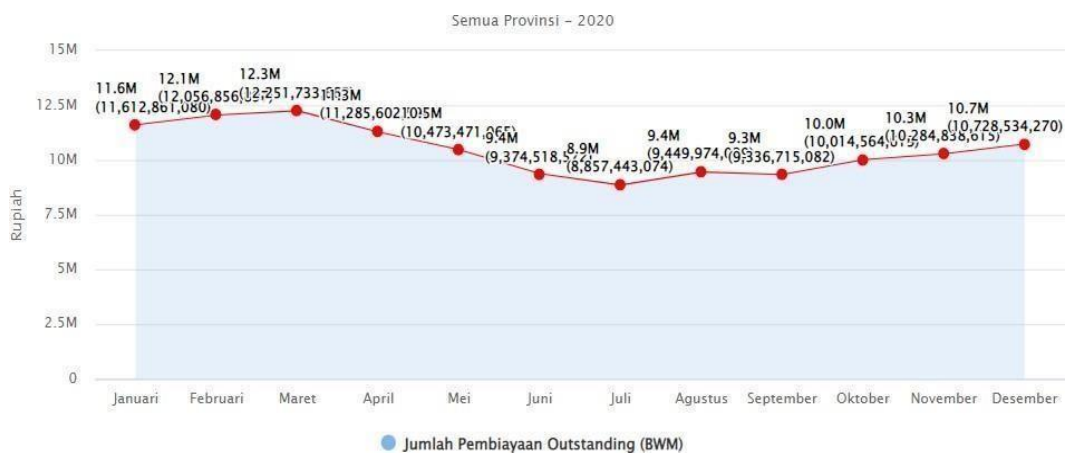
Tabel 1.5. Data Pembiayaan Outstanding BWM di Indonesia tahun 2020
(dalam ribuan rupiah)

NO	Propinsi Lokasi BWM	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
2	SUMUT	79.280	113.520	101.080	89.660	72.680	60.920	48.455	38.065	25.120	18.780	60.140	66.180
3	SUMBAR	321.125	298.535	252.205	200.355	168.660	118.355	72.645	49.015	29.310	347.390	401.025	440.129
4	RIAU	325.700	282.580	282.400	235.880	208.220	172.020	160.700	299.000	296.480	329.100	323.470	296.470
5	JAMBI	156.090	210.180	291.030	264.540	251.410	233.420	218.790	194.230	304.350	293.480	253.790	237.720
6	SUMATERA SELATAN	28.380	52.860	93.560	83.360	76.760	65.740	58.000	47.520	38.020	34.620	33.660	52.008
7	LAMPUNG	209.458	204.809	184.578	168.308	151.142	131.314	104.247	80.620	59.238	34.916	15.353	27.380
8	JAWA BARAT	1.590.222	1.713.943	1.710.899	1.650.680	1.632.498	1.535.219	1.446.719	1.377.548	1.391.782	1.482.423	1.438.581	1.326.303
9	JAWA TENGAH	2.486.760	2.422.786	2.321.202	2.113.053	1.916.264	1.665.891	1.609.139	1.883.666	1.836.376	2.049.341	2.115.597	2.183
10	DI YOGYAKARTA	900.979	889.009	936.271	939.631	939.631	881.386	839.836	960.316	871.292	832.555	894.744	886.897
11	JAWA TIMUR	3.589.740	3.739.979	3.889.946	3.487.004	3.159.600	2.756.090	2.634.576	2.657.529	2.538.041	2.639.319	2.779.942	3.047.702
12	BANTEN	1.003.810	1.089.858	1.177.708	1.131.383	1.050.097	1.029.537	982.695	979.119	944.305	779.807	651.922	606.228
13	NUSATENGARA BARAT	209.580	179.140	153.620	112.560	94.980	65.540	41.780	325.700	384.860	488.640	565.720	573.740
14	KALIMANTAN SELATAN	40.820	104.540	95.940	84.140	77.740	65.100	54.740	60.260	91.520	97.360	158.820	184.960
15	KALIMANTAN TIMUR	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050
16	SULAWESI SELATAN	105.337	91.775	84.775	98.175	94.425	94.275	87.362	85.000	82.750	80.500	80.500	76.250
17	MALUKU	128.700	147.760	193.840	166.280	141.140	127.560	98.200	72.161	60.300	129.250	145.840	189.741
18	PAPUA	85.570	93.540	96.590	80.710	71.890	60.200	71.270	60.760	123.490	104.900	91.620	66.920

Sumber : LKMS- BWM I Statistik Data Nasional

Tabel 1.5 merupakan data dari jumlah pembiayaan outstanding Bank Wakaf Mikro selama tahun 2020, dimana tahun ini merupakan tahun awal terjadinya pandemi covid-19 di dunia.

Trend perkembangan jumlah pembiayaan outstanding setiap bulan selama tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.5 Perkembangan Jumlah Pembiayaan Outstanding BWM Tahun 2022

Dari gambar 1.5 di atas terlihat pada awal awal terjadinya pandemi covid- 19 dibulan Maret, jumlah pembiayaan outstanding mengalami penurunan dan mencapai jumlah terendah pada bulan Juli, mulai bulan Agustus perlahan lahan mengalami kenaikan sampai di bulan Desember. Persentase pembiayaan outstanding dari pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2020 adalah 58% atau 42 % dari pembiayaan yang disalurkan telah tertagih.

Dari data data yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 24,3 Milyar, dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 53 % dari total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2018. Hal itu ada kemungkinan karena bertambahnya jumlah Bank Wakaf Mikro pada 7 propinsi dari tahun 2018. Untuk jumlah pembiayaan outstanding pada akhir Desember 2019, persentase pembiayaan outstanding dari pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 adalah 46% atau 54 % dari pembiayaan yang disalurkan telah tertagih. Jumlah persentase tersebut mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2018.

Pada tahun 2020 jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada nasabah adalah sebesar Rp 18,2 Milyar, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 25%., sedangkan persentase pembiayaan outstanding dari pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2020 adalah 58% atau 42 % dari pembiayaan yang disalurkan telah tertagih. Jumlah persentase tertagihnya jumlah pembiayaan menurun sebesar 10% dari tahun 2019. Kondisi ini merupakan imbas dari terjadinya wabah covid-19 yang melanda dunia di awal Maret 2020. Wabah pandemi covid-19 ini membuat nasabah yang berusaha di sekitar pesantren banyak yang tidak berjalan usahanya karena pesantren sempat tutup di awal – awal berlangsungnya covid-19, sehingga penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro terkendala dan mengalami penurunan. Penurunan aktivitas ekonomi yang diinduksi covid -19 mempengaruhi efisiensi keuangan dan sosial lembaga keuangan mikro (LKM). Temuan penelitian Chen Zheng (2020) adalah bahwa dampak yang diinduksi pandemi mengurangi efisiensi keuangan LKM, namun, efisiensi sosial LKM meningkat di bawah dampak covid - 19. Penawaran dan permintaan pendanaan LKM merupakan faktor yang potensial yang mengakibatkan *inefisiensi*. (Zheng & Zhang, 2021) Dampak pandemi COVID-19 telah menurunkan tingkat efisiensi keuangan 2 lembaga keuangan mikro syariah

di Jawa Timur yaitu KSU Al Ikhlas dari 85,08 % menjadi 81,41% dan Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan dari 82,38 % menjadi 80,18 %.(Wahyudi & Pawestri, 2021) Berdasarkan studi literature review, didapatkan bahwa pembiayaan syariah mempunyai keunggulan berupa prinsip berbagi risiko untuk mengatasi kerentanan usaha UMKM. Keunggulan lain terletak pada pedoman syariah yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam pembiayaan syariah tidak ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihaklain, dan tidak ada perlakuan yang sepihak atau represif kepada pihak lain. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki, pembiayaan syariah harus dikondisikan agar sesuai dengan kebutuhan usaha (business nature), dilengkapi dengan model pemberdayaan sebagai bagian dari skema pembiayaan UMKM. (Nasution, 2021).Meningat peran dari Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat besar dalam mendorong berkembangnya usaha mikro apalagi dalam menghadapi masa pandemic covid saat ini, maka keberadaan LKMS perlu tetap dijaga dan ditingkatkankinerjanya dengan cara dikelola secara efisien dan efektif. Efisiensi lembaga keuangan telah diukur dalam beberapa dekade terakhir untuk mengelola, mengawasi, dan memantau kegiatan lembaga keuangan. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang sangat untuk penting sekali untuk mengevaluasi tingkat efisiensi lembaga keuangan yang ada dalam suatu perekonomian (Sudarmadji & Suendarti, 2019). Sejalan dengan itu maka pengetahuan tentang efisiensi lembaga keuangan dan faktor-faktor yang mendasari pengaruh efisiensi sangat penting. Pengetahuan tersebut diperlukan untuk memberikan wawasan bagi manajer, regulator, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan apalagi di masa pandemi seperti yang masih berlangsung sampai saat ini.

Bank Wakaf merupakan salah satu Lembaga keuangan mikro syariah yang menerima dana sosial, baik dari CSR perusahaan maupun donasi personal dan memiliki program pendampingan dan pelatihan kepada para nasabahnya, sehingga keberadaan Bank Wakaf Mikro memang sangat diharapkan dapat menjadi salah satu alat pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Di samping itu, karena bank wakaf mikroini baru berdiri, maka perlu dikaji permasalahan yang ada didalamnya terutama tingkat efisiensi dan efektifitasnya sebelum masa pandemi dan pada saat masa

pandemi covid -19 yang masih berlangsung sampai saat ini.dan kontribusinya terhadap pengembangan UMKM yang berada di sekitar pesantren dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Di dalam agama Islam pun ada diajarkan akhlak mulia kepada ummatnya yaitu agar melaksanakan seluruh pekerjaan itu dengan baik, efektif, efisien dan professional atau dalam istilah lain dikatakan dengan ihsan dan itqan. Ihsan dan itqan adalah dua istilah yang terdapat dalam Alquran dan sunah yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang muslim yang harus dilakukannya dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini. Ihsan berarti optimalisasi dalam kebaikan. Artinya, kebaikan apa pun yang dilakukan seorang muslim harus selalu optimal dalam persiapan dan pelaksanaannya, agar hasilnya didapat secara optimal pula. Itqan berarti kesungguhan dan kemantapan dalam melaksanakan suatu tugas, sehingga dikerjakannya secara maksimal, tidak asal- asalan, sampai dengan pekerjaan tersebut tuntas dan selesai dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melaksanakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dilakukannya dengan itqan." (HR Thabrani).

Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat mengatasi hambatan yang sedang dialami pada saat pandemi covid-19 yang masih belum berakhir ini sesuai dengan latar belakang berdirinya BWM didasari oleh tiga hal yaitu ketimpangan dan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perspektif Islam sendiri, kemiskinan adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan kemiskinan dekat dengan kekufuran yang membahayakan akidah serta keimanan seseorang. Keputusan seseorang karena kemiskinan rentan menjuruskan seseorang pada hal-hal yang menyekutkan Allah. Bahkan kemiskinan membuat seseorang menjadi buta serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi. Begitu juga halnya dengan pengurus Bank Wakaf Mikro yang telah menerima amanat dalam mengurus operasional BWM seharusnya dapat memenuhi amanah dengan semaksimal mungkin agar betul-betul mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan nasabah BWM di sekitar wilayah pesantren dan mencapai apa yang menjadi tujuan pendirian Bank Wakaf Mikro yaitu mewujudkan kesejahteraan umat.

Allah berfirman dalam QS ; AL Anfal [8]: 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui."

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan kajian terhadap efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro yang ada di Indonesia dalam bentuk penelitian yang berjudul : “ **EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS BANK WAKAFMIKRO DI INDONESIA**”



B. Masalah Penelitian

Dari uraian di atas, yang menjadi masalah penelitian di sini adalah :

1. Adanya beberapa temuan bahwa adanya penurunan efisiensi Lembaga keuangan mikro akibat pandemi covid -19
2. Terjadinya penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro pada awal terjadinya pandemic covid-19
3. Adanya research gap tentang faktor – faktor yang mempengaruhi inefisiensi dan efektifitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah
4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin khususnya di kabupaten yang berada di propinsi lokasi Bank Wakaf Mikro dari tahun 2018 sampai tahun 2020

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum pandemic covid-19 ?
2. Bagaimanakah efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia pada saat pandemic covid-19 ?

3. Apakah ada perbedaan efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum pandemic dan pada saat pandemic covid-19 ?
4. Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas pada Bank Wakaf Mikro di Indonesia ?
5. Apakah aset, modal , biaya operasional, jumlah nasabah dan jumlah KUMPI berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia ?
6. Apakah efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten lokasi Bank Wakaf Mikro ?
7. Bagaimana efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro dari perspektif akuntansi manajemen syariah dan *maqhasid syariah* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum pandemic covid-19
2. Menganalisis efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia pada saat pandemic covid-19
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada perbedaan efisiensi dan efektifitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum pandemic dan pada saat pandemic covid-19
4. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aset, modal , biaya operasional, jumlah nasabah dan jumlah KUMPI terhadap efisiensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten lokasi Bank Wakaf Mikro ?
7. Menganalisis efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro dari perspektif akuntansi manajemen syariah dan *maqhasid syariah*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan kajian ekonomi Syariah khususnya efisiensi dan efektivitas lembaga keuangan mikro syariah dalam masa pandemi covid-19 saat ini

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan, LAZNAS BSMU, Pinbuk dan stake holders lainnya serta pihak pesantren yang merupakan pengelola BWM yang ada di seluruh Indonesia

F. Sistematika Pembahasan

Hasil Penelitian disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, sehingga pembahasan lebih runtun dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

BAB ini akan menggambarkan latarbelakang masalah dan permasalahan yang dialami Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Bank Wakaf Mikro dalam masa pandemic covid-19 serta pentingnya pengukuran efisiensi dan efektifitas sebuah lembaga keuangan mikro khususnya BWM, serta menganalisis perbedaan efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Setelah latar belakang masalah digambarkan secara komprehensif maka dirumuskan permasalahan-permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan, kegunaan penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab II. Landasan teori

BAB ini berisikan teori- teori yang akan dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dari objek penelitian. Bagian ini, akan menyajikan teori -teori yang dibangun berdasarkan pada konsep *grand*

theory, middle theory dan *applied theory* sebagai dasar dalam pijakan pada penelitian ini. *Grand theory* yang dibangun pertama kali dalam penelitian ini adalah teori- teori Akuntansi Syariah. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah akuntansi manajemen syariah. sedangkan *applied theory* dalam penelitian ini adalah Efisiensi, Penganggaran, *Balance Score Card*, Efektivitas

Bab III. Metodologi Penelitian

BAB ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai alat untuk mempertajam akurasi data dan analisa dalam penelitian. Pada metodologi penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data. Untuk teknik analisis data, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro digunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)* , untuk menguji faktor - faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro digunakan Regresi Data Panel dan uji beda *Uji Paired Sample t test* digunakan untuk melihat perbedaan efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro sebelum dan pada saat pandemi covid-19

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BAB Ini merupakan inti dari penelitian dengan menjelaskan hasil dan pembahasan masalah, tentang efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Pada BAB ini akan diawali dengan sejarah lahirnya Bank Wakaf Mikro sampai kepada model bisnisnya. Berikutnya adalah hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia baik sebelum terjadinya pandemi covid 19 dan pada saat berlangsungnya pandemi covid-19 dan diteruskan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro dan perbedaannya sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Pembahasan diakhiri dengan efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro yang dilihat dari perspektif maaqashid syariah.

BAB V. Penutup

BAB ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh masalah yang telah dibahas sebagai jawaban atas pokok masalah, kemudian akan disertakan saran-saran yang diharapkan akan menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

